

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kota adalah pusat dari sebuah kegiatan masyarakat, sebagian besar dari masyarakat menganggap bahwa di perkotaan adalah tempat yang menjanjikan dalam hal mata pencaharian. Hal ini kemudian di dukung dengan besarnya tingkat urbanisasi yang terjadi. Namun, modernisasi telah mengubah suatu pekerjaan dengan tenaga manusia kini diubah dengan tenaga mesin. Hal ini yang membuat peluang pekerjaan di perkotaan menjadi lebih terbatas. Terbatasnya mata pencaharian/peluang kerja di perkotaan yang menimbulkan tingginya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Urbanisasi sebagian besar dari penduduk desa yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian dan pendidikan yang cukup, sehingga mereka tidak akan sanggup memenuhi semua tuntutan pekerjaan di perkotaan. Salah satunya dengan cara menggeluti usaha kecil yaitu pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan istilah penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut ditafsirkan dengan jumlah kaki pedagangnyanya ada lima. Lima kaki itu adalah dua kaki pedagang yang ditambah lagi tiga kaki pada gerobaknya¹. Pada dahulunya PKL disebut sebagai pedagang emperan jalan, namun PKL digunakan juga pada pedagang di jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima sendiri adalah cenderung diperuntukkan untuk bagian depan bangunan rumah toko, yang dimana telah terjadi kesepakatan antar perencanaan kota bahwa seharusnya bagian depan dari rumah toko lebarnya disesuaikan sekitar lima kaki dan harus diwajibkan untuk jalur yang dimana para pejalan kaki dapat melintas. Namun pada ruang selebar itu kira-kira lima kaki tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsinya menjadi area tempat para pedagang-pedagang kecil berjualan, dari situlah istilah pedagang kaki lima dikenal secara umum.

Kelompok pedagang kaki lima adalah bentuk produk yang disebabkan oleh aktifitas yang dilakukan oleh PKL. Pada serangkaian suatu kebijakan yang dapat diwujudkan dalam suatu kegiatan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya

¹ Purwadinata, WJS. 1986. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” Jakarta: Balai Pustaka. Hal 671

adalah dengan membuat kebijakan mempermudah dalam melaksanakan suatu rancangan pada program pemerintahan. Pada perwujudan perumusan suatu kebijakan ataupun peraturan daerah, dikarenakan pemerintah daerah harus memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai. Pada umumnya PKL merupakan *self-employed*, yaitu mayoritas PKL terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima ini merupakan suatu bentuk usaha sektor informal, sebagai sebuah alternatif lapangan pekerjaan untuk kaum urbanisasi. Lapangan pekerjaan semakin hari semakin sempit ikut menjadi faktor banyaknya masyarakat memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima. Namun demikian, keberadaan PKL di perkotaan besar sering menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi, misalnya kumuh, kemacetan dan konflik di dalam masyarakat. Dalam menangani hal tersebut dengan melakukan penataan pedagang kaki lima dalam mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif didalamnya.

Pedagang kaki lima memiliki 12 ciri-ciri yaitu : (1) Tergolong mata pencaharian pokok, (2) Tergolong dalam angkatan kerja produktif, (3) Tingkat pendidikan relatif rendah, (4) Pendatang belum mempunyai status kependudukan yang jelas di kota, (5) mulai berdagang/usaha sejak 5-10 tahun, (6) Awal pekerjaan umumnya petani dan buruh, (7) Modal usaha sangat lemah dan omzet rendah, (8) Modal sendiri dan belum mempunyai hubungan dengan bank, (9) Kemampuan wiraswasta masih lemah dalam memupuk modal, (10) Memperdagangkan kebutuhan sekunder dan bahan pangan, (11) Terkena pajak retribusi, (12) Tingkat pendapatan relatif rendah².

Keberadaan PKL merupakan sebuah usaha mikro yang mempunyai dampak yang cukup penting dalam perekonomian di Kota Bojonegoro. Keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap sebagai faktor permasalahan di perkotaan dikarenakan sifatnya menggunakan beberapa fasilitas umum dalam berdagang/usaha. Contoh salah satu dampak negatif pedagang kaki lima yaitu berkurangnya akses publik disebabkan oleh pedagang kaki lima yang menempati badan jalan sebagai tempat berdagang atau usaha. Hal tersebut menimbulkan beberapa gangguan ketentraman, ketertibatan masyarakat, kebersihan lingkungan

² Alisjahbana and Sukidin. 2006. "*Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*". ITS Press. 41 (4), 278-287

ataupun kemacetan lalu lintas. Akan tetapi kita tidak bisa dipungkiri yaitu keberadaan pedagang kaki lima juga menimbulkan dampak postifi salah satunya adalah mengurangi pengangguran pada kota-kota besar dan sebagai penyedia barang dengan harga murah.

Masalah pedagang kaki lima tersebut tidak kunjung selesai di kota Bojonegoro dan permasalahan ini muncul tiap tahunnya dan berlangsung tanpa adanya tanda solusi yang cocok. Keberadaan PKL kini kerap dianggap ilegal sebab menempati ruang publik yang yang tidak sesuai dengan 3K (Kebersihan, Keindahan dan Kerapian). Hal tersebut pedagang kaki lima seringkali menjadi target dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten misalnya penertiban dan pengusuran.

Tabel I.1 Permasalahan Pedagang Kaki Lima

Permasalahan	Sumber
Terdapat keluhan dari perkantoran yang ada di seputar wilayah pusat kota, antara lain Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kantor Bakorwil, Masjid Agung dan RS Aisyah yaitu: keberadaan PKL mengganggu keindahan kantor, PKL juga menutupi plang nama beberapa instansi tersebut dan semrawutnya parkir pengunjung yang ada di warung. ³	suarabanyuurip.com
Kondisi di sekitar kawasan alun-alun dipenuhi dengan PKL yang semrawut, sekitar jalan Kartini terdapat kabel semrawut dikarenakan PKL mengambil aliran listrik dari warga sekitar, di Jalan DI Panjaitan kiri kanan jalan penuh diisi oleh PKL sehingga transportasi sulit melintas, dan para PKL tentu akan menghasilkan sampah basah setiap harinya jika di biarkan begitu saja akan menjadi wabah penyakit ⁴	detakpos.com
Banyaknya PKL yang masih berjualan di bahu jalan yang mengakibatkan ruas jalan nampak kumuh di sekitar Jalan Teuku Umar, Diponegoro, Panglima Sudirman, Untung Suropati dan di sekitar Alun-Alun Kota Bojonegoro. Para PKL ini menjual makanan dan minuman nekat berjualan meski telah beberapa kali ditertibkan oleh Satpol PP Pemkab Bojonegoro. Bahkan diantara para PKL tersebut ada yang berjualan menggunakan mobil bak terbuka salah satunya penjual buah, cara tersebut dilakukan untuk kabur dari patroli Satpol PP ⁵	news.detik.com

³Wedia, Ririn, 2015. “PKL Bojonegoro Tak Mau Direlokasi,” dalam <https://suarabanyuurip.com/index.php/?kabar/baca/pkl-bojonegoro-tak-mau-direlokasi>. (Diakses pada 4 Maret 2021)

⁴ Musthofiyah, Yefitta, 2020. “Tempat Penataan PKL Perlu Dilengkapi Listrik Dan Air Bersih,” dalam <https://detakpos.com/kampusiana/penataan-pkl-perlu-dilengkapi-listrik-dan-air-bersih/>. (Diakses pada 4 Maret 2021)

⁵ Rofiq, Ainur. 2017. “Banyak PKL Di Bojonegoro Jualan Di Trotoar, Pak Bupati?,” dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3420532/banyak-pkl-di-bojonegoro-jualan-di-trotoar-pak-bupati>. (Diakses pada 4 Maret 2021)

Hal tersebut merupakan sebuah masalah yang cukup kompleks akan tetapi dalam menghadapi dua sisi dilematis. Dalam pertentangan antara kepentingan hidup dengan kepentingan pemerintah akan bertabrakan dan menimbulkan friksi di antara keduanya. Para pedagang kaki lima pada umumnya tidak mempunyai keahlian khusus yang mengharuskan mereka bertahan di dalam kondisi yang memprihatinkan dengan banyaknya kendala yang harus dihadapi termasuk tidak adanya modal tempat berjualan yang nomaden yang ditambah lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Melihat kondisi seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada kepentingan masyarakat guna kesejahteraan masyarakatnya yang terfokus pada asas oportinitas⁶.

Permasalahan eksternal yang terjadi di tempat-tempat lain berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima adalah kembalinya keberadaan pedagang kaki lima yang telah di relokasi ke tempat semula yang di tertibkan. Pedagang kaki lima yang dulu ditertibkan dan pedanag yang baru yang telah memiliki lokasi tersebut melaksanakan aktivitasnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yant mempunyai daya tarik dan memiliki potensi besar bagi pedagang kaki lima. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa lokasi perdagang pedagang kaki lima ini perlu dilakukannya sebuah tindakan relokasi dengan mengadopsi kakarakteristik pedagang kaki lima ke lokasi baru. Kegiatan utama yang berlangsung pada lokasi PKL tersebut.

Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum⁷. Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki wewenang dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Berkaitan dengan pembangunan ini terdapat salah satu upaya penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Ripley and Franklin (dalam winarno, 2014;148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan,

⁶ Peraturan Daerah, 2015, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*.

⁷ Peraturan Daerah, 2015, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*.

keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata⁸. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014;149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan tersebut dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum⁹.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Retno Widjajanti yang berjudul *“Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di pusat Kota Simping Lima Semarang”*. Mengkaji tentang bagaimana karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar kebijakan penataan ruang aktivitas PKL. Dalam penelitian ini terdapat sasaran utama peneliti yaitu, lebih kepada identifikasi karakteristik aktivitas PKL, lokasi, tempat usaha PKL, dan identifikasi preferensi PKL serta konsumen PKL, yang dimana terdapat kondisi dualistik khususnya pada kasus kawasan simpang lima yang harus segera ditangani secara khusus mulai dari perencanaan, perancangan dan peraturan-peraturan pendukungnya agar permasalahan yang timbul tidak berlarut-larut¹⁰.
2. Penelitian Aji Wahyu Heriyanto yang berjudul *“Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simping Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan Simping Lima dan jalan Pahlawan adalah berdampak positif pada segi sosial ekonominya yang dimana meningkat tepatnya waktu berusaha hubungan sosial diantara pedagang. Kemungkinan dan ketepatan waktu usaha dan dapat meningkatkan

⁸ Winarno, Budi. 2014. *“Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus (Cetakan Kedua),”* Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS. 3 (1), 1-12.

⁹ Peraturan Daerah, 2015, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*.

¹⁰ Widjajanti, R. 2009. *“Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simping Lima, Semarang,”* Teknik 30, no. 3 : 162–170.

pendapatan pedagang kaki lima. Masih menjadi sebuah kendala yang dihadapi pedagang kaki lima adalah sisi infrastruktur dan fasilitas setelah mengalami relokasi pemerintah sebagai pengelola diharapkan mampu memperbaiki kawasan pejalan kaki yang rusak dan memperluas ruang parkir¹¹.

3. Penelitian Rochmat Aldi Purnomo yang berjudul “*Dampak relokasi terhadap lingkungan sosial pedagang kaki lima di pusat kuliner Prastistha Harsa Purwokerto*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek lingkungan sosial dari pedagang kaki lima antara sebelum dan sesudah direlokasi ke Prastistha Harsa. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun responden yang dipilih yaitu Kepala Pengelola Prastistha Harsa, Ketua Paguyuban Prastistha Harsa, pedagang kuliner Prastistha Harsa. Populasi pedagang yang telah direlokasi ke Prastistha Harsa sejumlah 65 orang pedagang dan sampel 40 pedagang. Pemilihan sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis Wilcoxon test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan rata-rata dari persepsi pedagang tentang keamanan, kebersihan, penerangan, dan kemudahan saat sebelum dan sesudah relokasi¹².
4. Penelitian Rintar Agus Simatupang dan E Harningsih terkait “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta)*”. Salah satunya adalah sektor informal yang banyak diminati oleh para pengangguran (selain yang memang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima (PKL). Kelompok pedagang kaki lima ini sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan. Penelitian terdahulu ini secara langsung menganalisis pemberdayaan sektor informal, yang berkaitan dengan studi tentang faktor-

¹¹ Heriyanto, A. W. 2012. “*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*,” Economics Development Analysis Journal 1, no. 1.

¹² Purnomo, R. A. 2016. “*Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Prastistha Harsa Purwokerto*,” Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi 11, no. 1: 1–9.

faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pedagang kaki lima¹³.

Berdasarkan beberapa pemaparan studi terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Retno Widjajanti tentang mengkaji bagaimana karakteristik aktivitas PKL sebagai dasar kebijakan penataan ruang aktivitas PKL. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aji Wahyu Hariyanto yang meneliti tentang dampak sosial dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima dan jalan pahlawan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Rochmat Aldi Purnomo terkait analisis aspek lingkungan dari PKL antara sebelum dan sesudah direlokasi. Terakhir penelitian oleh Rintar Agus Simatupang dan E Harningsih tentang analisis pemberdayaan sektor informal yang berkaitan dengan studi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pedagang kaki lima.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat ditemukan perbedaan pertama, penelitian dengan Judul *“karakteristik aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota Simpang Lima Semarang”*, letak perbedaannya terdapat pada isu yang dibahas yakni keberadaan ruang aktivitas PKL, dalam penelitian ini isu yang dibahas kebijakan penataan PKL, fokus penelitian yakni pada karakteristik aktivitas PKL, dalam penelitian ini fokus yang dibahas implementasi kebijakan penataan PKL, unit analisis yakni kebijakan atau program publik, dalam penelitian ini target group (PKL). Kedua, penelitian dengan Judul *“dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima dan jalan jalan pahlawan kota Semarang”*, letak perbedaannya pada teori yang digunakan yakni teori lokasi menurut Tarigan (2005), dalam penelitian ini menggunakan model proses atau alur Smith, unit analisisnya yakni individu atau kelompok, dalam penelitian ini target group (PKL). Ke tiga, penelitian dengan Judul *“dampak relokasi terhadap lingkungan sosial pedagang kaki lima di pusat kuliner Pratistha Harsa Purwokerto”*, letak perbedaannya terdapat pada isu yang dibahas yakni konsep peningkatan dan pengembangan sektor informal, dalam

¹³ Hariningsih, E., & Agus Simatupang, R. 2008. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta,”* Jurnal Bisnis & Manajemen 4, no. 2 : 25–40.

penelitian ini isu yang dibahas kebijakan penataan PKL, fokus penelitian yakni pada aspek lingkungan sosial, dalam penelitian ini fokusnya adalah implementasi kebijakan penataan PKL, Unit analisisnya adalah individu atau kelompok, dalam penelitian ini target group (PKL). Ke empat, penelitian dengan Judul “*faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha pedagang eceran (studi kasus pedagang kaki lima di kota Yogyakarta)*”, letak perbedaannya terdapat pada isu yang dibahas yakni studi tentang analisis pemberdayaan sektor informal, dalam penelitian ini isu yang dibahas kebijakan penataan PKL, fokus penelitian yakni pada faktor kinerja PKL, dalam penelitian ini fokusnya adalah implementasi kebijakan penataan PKL, unit analisisnya adalah individu atau kelompok, dalam penelitian ini target group (PKL).

Pelaksanaan penertiban PKL dalam rangka penegakan Perda yang dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan penertiban dilakukan dalam bentuk penertiban secara langsung dan tidak langsung. Penertiban tersebut dilakukan dengan mekanisme penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, dengan cara pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan dalam mengambil sebuah tindakan guna pemanfaatan ruang publik dapat terencana dapat terwujud. Dalam mengatasi PKL terdapat tiga pilihan, yaitu pertama, negara harus menjadi kunci terhadap pengaturan PKL, di karenakan keberadaan negara sangat penting dalam proses pembangunan. Kedua, organisasi PKL dibiarkan guna dapat mengatur kegiatan mereka sendiri. Ketiga, menyarankan kepada pemerintah dan PKL dalam hal negoisasi pada ruang-ruang aksi¹⁴.

Penertiban pedagang kaki lima ini harus meliputi beberapa aspek penting didalamnya yaitu, (1) Komunikasi, dalam sebuah pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Bojonegoro ini diawali dengan pelaksanaan penertiban,

¹⁴ Agustinus, Tumpal Hasiholan, et al. 2010. “*Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara*”.(Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi). 3(3), 132-143.

penertiban ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum¹⁵. Sosialisasi penertiban ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bojonegoro namun sosialisasi tidak secara khusus dalam mensosialisasi kebijakan penertiban PKL sehingga sosialisasi tidak dapat maksimal sampai kepada pedagang kaki lima. Pelaksanaan kebijakan harus dibarengi dengan sosialisasi secara intensif dan efektif dalam hal penyampaian, kebijakan sangat berdampak pada ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi PKL ataupun masyarakat. Sosialisasi dapat diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat. (2) Sumber daya, sumber daya fasilitas menjadi salah satu penunjang yang berdampak pada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan penertiban dilakukan, misalnya pembangunan shelter (tenda) untuk fasilitas berjualan atau berdagang, menyediakan tempat sampah, dan melakukan retribusi. Fasilitas merupakan sarana-sarana yang digunakan dalam menjamin operasional kebijakan yang dapat memudahkan dan memberikan suatu pelayanan dalam sebuah implementasi kebijakan. Berikut adalah data PKL TEUKUGORO sebelum dan sesudah di lakukan penataan pedagang kaki lima.

Tabel I.2 PKL TEUKUGORO

No.	NAMA	JENIS JUALAN	KABUPATEN	
			BOJONEGORO	LAIN
1.	Ali Usman	Sempol	Pejambon ,Sumberejo	
2.	Rohmad Syarif	Bekicot		Cepu
3.	Rahadya Anisa	Bakso	Campurejo	
4.	Bambang Tikno	Kopi		Tangerang
5.	Achmad Suparlan	Colding Cincau	Banjarejo	
6.	Ajiz Abdul Muntolip	Nasi Goreng	Mori , Trucuk	
7.	Fatkhur Rochman	Teh Poci	Guyangan,trucuk	
8.	Hernik Setyowati	Stmj	Tanjungharjo, kapas	

¹⁵ Peraturan Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.*

9.	Sutrisno	Teh Poci	Katur,Gayam	
10.	David	Lumpia	Kadipaten	
11.	Kamiludin	Roti Jon	Sidodadi, Sukosewu	
12.	Mohamad Imam Kanafi	Tahu Tek	Klangon	
13.	Gunawan Raharjo	Mpek Mpek 86	Campurejo	
14.	Muktiono	Es Degan	Banjarejo	
15.	Devi Rahma Eka Sari	Kebab	Sumberejo	
16.	Agus Setyono	Thai Tea		Singgahan, Tuban
17.	Hardiyanto	Martabak	Kapas	
18.	Suwanto	Nasi Padang	Klangon	
19	Ipahariani	Bekicot	Kepatihan	
20	Riza Andika	Ronde	Balen	
21.	Siti Indasa	Pentol Jupe	Sumberejo	
22.	Wisma Wijayanto	Siomay	Sukorejo	
23.	Wardoyo	Telur Gulung	Sumbang	
24.	Dian Sepitri	Takoyaki	Ledok wetan	
25.	Febri Aldi	Gado-Gado	Ngumpakdalem, Dander	
26.	Sugianto	Martabak	Ledok kulon	
27.	Juwari	Sari Laut	Ledok kulon	
28.	Asep Komarudin	Leker	Sumberejo	
29.	Antok Hari Purwanto	Kebab		Surabaya
30.	Wadjihatul Husna	Sari Rasa	Karangpacar	
31.	Sudariono	Rokok	Klangon	
32.	Syach Rheza	Teh Poci	Sukorejo	
33.	Bahrul Anam	Nasgor	Sukosewu	
34.	Agus Arianto	Kentuky	Ngumpak dalem,Dander	
35.	Mawardi	Seafood		Sekaran,Lamongan

36.	Isroin	Tahu Crispy	Ledok kulon	
37.	Seni Erawati	Martabak	Kadipaten	
38.	Kusriyani	Pangsit Jakarta	Sukoharjo	
39.	Paino	Eka Jaya	Ledok kulon	
40.	Suparmi	Juz Buah	Banjarejo	
41.	Febi Yoki Rosadi	Terang Bulan	Plesungan, Kapas	
42.	M.Khoiri	Martabak	Banjarejo	
43.	Ahmad Prijanto	Sosis Bakar	Balen	
44.	Fathur Rohman	Es Degan	Mojokampung	
45.	Sumarto	Jasuke	Kanor	
46.	Sumandam	Putu Ayu	Kanor	
47.	Suraji	Penyetan	Kanor	
48.	Suwono	Martabak	Dander	
49.	Slamet	Pisang Lumpur	Trucuk	
50.	Supriyatin	Bebek Gobyos	Karangpacar	
51.	Sulistyawati	Tahu Campur	Ledok Kulon	
52.	Mulyono	Tahu Telur	Trucuk	
53.	Agung	Ayam Kremes	Banjarejo	
54.	Wahyudi	Roti Bakar		Sulokuro,Lamongan
55.	Arif Triyono	Nasgor	Ledok wetan	
56.	Alfiatun Ni'mah	Nasi Padang	Sumberejo, Trucuk	
57.	Nita Mariyana	Sate Blora	Gayam	
58.	Beni Saputra	Lontong Tahu		Garut
58.	Nurhadi	Penyetan	Sidobandung,Balen	
60.	Ipin	Kebab	Sukorejo	
61.	Hendra Febriyanto	Es Ahola	Kapas	
62.	Yudi	Raja Es	Banjarejo	
63.	Lintang Gupito Aji	Martabak	Gg.Sd Sukorejo.	

64.	Susanti	Nasgor	Sendangrejo , Dander	
65.	Drs.Sarijus	Penyetan	Kemamang, Balen	
67.	Siti Kholisah	Sate	Ledok Kulon	
68.	Aziz Setiawan	Singkong Keju	Kapas	
69.	TinTin Yustiana	Roti Bakar	Sukorejo	
70.	Miftakhul Hadi	Teh Poci		Suko , Tuban
71.	Mardi	Pentol Keju	Kepatihan	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro cukup banyak. Penjual makanan terdapat 57 penjual sedangkan penjual minuman terdapat 14 penjual. Penertiban PKL di kota Bojonegoro mempunyai beberapa tahapan yaitu untuk tahapan awal lebih berkonsentrasi pada wilayah Kota Bojonegoro yang lebih dekat dan banyak terdapat PKL di sepanjang bahu jalan. Selanjutnya pada wilayah kecamatan Satpol PP yang telah dikoordinasikan dalam melaksanakan penataan tersebut. Sebelum melakukan penertiban, dilakukannya komunikasi dengan para PKL terlebih dahulu dan memberikan himbauan. Penertiban di fokuskan pada wilayah perkotaan terlebih dahulu yang mengingat skala volume pada kawasan, nanti secara bertahap akan beranjak ke area lain. Pada tahap pertama penertiban PKL yang dilakukan pada area alun-alun Kota Bojonegoro Jalan Mastumapel, KH Hasyim Asy'ari, Jalan Pahlawan dan Jalan Trunojoyo. Pada tahap kedua dilakukannya penertiban di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Diponegoro dan Jalan Teuku Umar. Pada tahap ketiga ini dilakukan di depan Pasar Banjarejo yang terdapat puluhan lapak PKL seni permanen dan permanen di bahu jalan, lapak mereka telah berdiri sejak 1998. Tahap keempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, di depan Pasar Banjarejo masih satu jalur. Tahap kelima di Jalan Mastrip, Jalan KH Mas Mansur, Jalan Hayam Wuruk dan Imam Bonjol, Terakhir di sepanjang Jalan Dr Cipto.

Setelah penertiban pemerintah melakukan program penataan pedagang

kaki lima di kota Bojonegoro terdapat tiga tahapan yaitu: (1) Sosialisasi, yang dimaksudkan yaitu supaya para pedagang kaki lima dapat mengerti dan memahami tujuan dalam melaksanakan penataan pedagang. Diharapkan kesadaran para pedagang kaki lima agar tidak berjualan di bahu jalan. (2) Menertibkan, jika setelah dilakukannya sosialisasi namun masih menggunakan bahu jalan untuk berdagang atau usaha, maka Satpol PP dapat mengambil sebuah tindakan penggusuran. (3) Merelokasi, setelah dilakukannya penggusuran, pemerintah daerah tidak lepas tangan dalam hal tersebut, tetapi kemudian melakukan tindakan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang semestinya dan seharusnya. Penataan pedagang kaki lima di kota Bojonegoro telah dilakukan dan ditempatkan pada enam jalan telah disiapkan menjadi lokasi penataan semua pedagang kaki lima (PKL). Menariknya, lokasi enam jalan protokol tersebut berada di kawasan Pecinan atau kampung mayoritas penghuninya keturunan orang Tionghoa yaitu di Jalan Imam Bonjol, Jalan Rajawali, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jaksa Agung Suprpto. Sedangkan, saat ini sudah ditempati PKL yakni di Jalan Kartini dan Jalan D. I Panjaitan atau selatan kantor BRI.

Pemerintah memiliki masterplan penataan PKL agar nanti PKL juga bisa lebih nyaman, enam jalan protokol tersebut saling sambung. Sehingga, akan menjadi kawasan yang tepat bagi PKL. Tetapi hingga kini belum semua PKL mau direlokasi. Sebagian masih nekat berjualan di seputaran alun-alun. Namun, petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan patroli. Pemerintah harus melakukan pembinaan pada PKL yang sudah mau ditata dalam waktu dekat ini dan diberikan kartu tanda usaha. Kartu tersebut sebagai bukti bahwa mereka adalah PKL resmi dan akan dibina oleh Pemkab setempat. Kartu tanda usaha akan diberikan pada semua PKL baik warga lokal maupun luar Bojonegoro. Sebab, mereka PKL yang berjualan di Bojonegoro. Kartu itu tidak bisa digunakan dalam mengajukan pinjaman, semisal ingin melakukan pinjaman harus menggunakan KPP (Kartu Pedagang Produktif). KPP berbeda dengan kartu tanda usaha. Kartu tanda usaha hanya digunakan sebagai bukti bahwa mereka PKL binaan Pemkab. Selain itu, para PKL akan diberikan tenda dan akan diberikan bimbingan teknis. Sehingga, produk yang mereka perdagangkan semakin berkualitas.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kesulitan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sedang dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang dibutuhkan masyarakat. Manfaat penelitian ini terdiri dari secara teoritis dan praktis

I.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama untuk kajian studi Implementasi Kebijakan. Penelitian ini melihat proses implementasi dari pelaksana kebijakan di tingkat daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang ada di daerah tersebut, selain itu penelitian ini juga melihat implementasi dari segi pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran kebijakan karena pada dasarnya proses implementasi kebijakan dilihat dari kebijakan itu sendiri, pelaksana kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga pada penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki khususnya di Kota Bojonegoro. Dari sudut pandang manfaat akademis, skripsi ini diharapkan dapat melengkapi gap penelitian terdahulu, sehingga akan ada pembaharuan pengetahuan dengan berbagai permasalahan yang ada.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan sebuah informasi terkait peningkatan kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam hal kebijakan publik yang lebih efisien dan efektif dalam

pengimplementasiannya.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik dalam buku yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* adalah sebuah pola ketergantungan yang sangat kompleks dari berbagai pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lain, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor Pemerintah¹⁶.

Pada kebijakan publik terdapat sebuah proses analisis kebijakan publik yaitu serangkaian aktivitas intelektual yang dilaksanakan dalam sebuah proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis ini nampak dalam serangkaian kegiatan yaitu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan¹⁷.

I.5.2 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik akan diimplementasikan oleh pemerintah beserta jajarannya, dan kebijakan publik bisa disebut juga sebagai tata cara pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Didalam kebijakan public seharusnya memiliki sebuah racangan yang tercipta dari keluhan masyarakat terhadap fenomena yang ada dan apa yang seharusnya di inginkan oleh masyarakat tersebut yang dibuat oleh pemerintah. Setelah ditampungnya semua aspirasi yang ada barulah pemerintah membuat perumusan kebijakan dan pembuatan rancangan kebijakan serta yang dikaji dalam hal tersebut adalah implementasi kebijakan¹⁸. Dalam pembahasan kali ini implementasi kebijakan bisa dikaitkan dengan penataan pedagang kaki lima yaitu tentang penyamaan penataan kota dan kenyataan adanya pedagang kaki lima serta pengimplementasiannya terhadap penataan pedagang kaki lima di Kota Bojonegoro. Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan itu bisa menjadi sulitjika terjadinya tarik-

¹⁶ Dunn, W. N. 2003. "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*". (Gadja Mada University Press). 32(1), 69-92.

¹⁷ Dunn, W. N. 1994. "*Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). 57-81

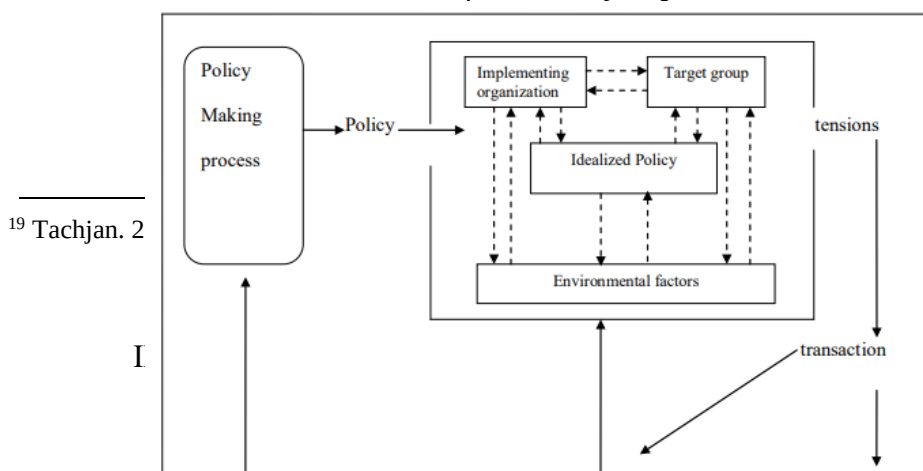
¹⁸ Putranto, A. 2019. "*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 'Penyediaan Ruang Bagi Pdagng Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran*" (Universitas Airlangga).

ulur antar aktor didalam pemerintahan yang memiliki sebuah kepentingan didalam penataan tersebut.

Di dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi. Model implementasi perlu dipakai dalam melakukan sebuah penelitian sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Pada penelitian ini menggunakan model alur atau proses yang digagas oleh Adam Smith. Model proses atau alur Smith merupakan salah satu model implementasi yang paling klasik. Menurut Smith, dalam proses implementasi ada 4 variabel yang perlu diperhatikan 4 variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu jika salah satu variabel itu ada yang tidak bersinergi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan diantara beberapa variabel lainnya¹⁹. Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem yang di mana suatu kebijakan sedang diatasi, maka interaksi didalamnya dan diantara kedua tersebut akan mengakibatkan tekanan atau ketegangan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut dapat menghasilkan pola-pola interaksi yang tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola interaksi tersebut dapat menghasilkan pembentukan lembaga tertentu. Terdapat empat variabel yang terkait dalam proses implementasi yakni.

1. *Idealized Policy*, yaitu pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan.
2. *Target Group*, yaitu bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan
3. *Implementing Organization*, yaitu pelaksana yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
4. *Environmental factors*, yaitu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi

Gambar I.1. A Model of The Policy Implementation Process



Sumber : Smith (dalam Tachjan, 2006: hal 38)²⁰

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan model implementasi dari Adam Smith. Penelitian kebijakan penataan pedagang kaki lima ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan tersebut dengan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi yang ada di setiap daerah. Sehingga perspektif kebijakan tersebut adalah *bottom up*. Model implementasi dari Adam Smith dipilih peneliti karena model implementasi dari Adam Smith bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan kerja kelompok sasaran sehingga dianggap cocok dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang diimplementasikan dan memiliki tujuan merubah dan kondisi kaki lima dengan menata pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro.

I.5.3 Faktor-Faktor Dalam Implementasi Kebijakan

Pada penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yang berupa untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka penelitian ini menggunakan model alur atau proses yang digagas oleh Adam Smith adapun pertimbangan yang digunakan mengapa peneliti menggunakan teori ini. Pertimbangan tersebut yakni: model alur atau proses meet mengacu kepada faktor-faktor kegagalan pada penelitian ini yang timbul dari perspektif pola interaksi implementor kelompok besaran dan lingkungan. Model proses atau alur Smith 1973 merupakan salah satu model implementasi yang paling klasik menurut Smith dalam

²⁰ Ibid. Hal. 38

implementasi pada empat variabel yang perlu diperhatikan titik ke 4 variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik²¹. Oleh karena itu jika salah satu variabel ada yang tidak bersinergi maka akan menyebabkan ketidakseimbangan di antara beberapa variabel. Ketidakseimbangan tersebut akan menimbulkan ketegangan ketegangan (*tension*) yang dapat munculnya diskresi seperti aksi fisik ataupun protes-protes yang dimana di dalam hal ini diperlukan untuk berdirinya institusi-institusi baru dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan. Jadi pola pola interaksi dari variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidak sesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin akan menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan sebagai umpan balik dalam mengurangi ketegangan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola interaksi dan kelembagaan.

Pada model ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari sudut pandang perubahan sosial politik. Biasanya dapat dilakukan pada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target group). Ada empat variabel yang terkait dalam proses implementasi, yakni *Idealized Policy*, *Target Group*, *Implementing Organization*, *Environmental factors*²²

1. Badan Pelaksana (*Implementing Organization*)

Badan pelaksana yaitu badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksana tersebut dapat berupa ganisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan. Maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur birokrasi. Struktur birokrasi diidentifikasi sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, serta pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang di dalam suatu badan badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial ataupun nyata yang sebagai titik acuan dasar dalam menjalankan kebijakan.

²¹ Tachjan. 2006. "*Implementasi Kebijakan Publik*". (AIPI : Bandung). Hal : 38

²² Tachjan. 2006. "*Implementasi Kebijakan Publik*". (AIPI : Bandung). Hal : 38

Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri surat formal organisasi dan sikap informal dari pegawainya. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para lembaga pelaksanaannya. Pada konteks ini kebijakan akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang menurut para lembaga pelaksana kebijakan agar bersikap ketat dan disiplin. Sedangkan pada konteks lain diperlukan pada lembaga pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi karakteristik kemampuan organisasi pelaksana kebijakan dalam kebijakan, antara lain:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam lembaga pelaksana tersebut
- c) Sumber daya lembaga politik yaitu hubungan antara eksekutif dan legislative
- d) Vitalitas suatu organisasi
- e) Tingkat komunikasi terbuka, yaitu bebas komunikasi horizontal dan vertikal, serta secara relatif tingginya tingkat kebebasan dalam komunikasi tersebut terhadap orang-orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi
- f) Kaitan lembaga formal dan informal dengan pembuatan kebijakan atau tubuh kebijakan

Selain itu, implementasi kebijakan yang berhasil garis di ikuti oleh kesadaran sikap dan mental terhadap keberlangsungan kebijakan secara menyeluruh. hal ini berarti bahwa kegagalan suatu yang mendominasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan, ketidakpatuhan dan ketidakmampuan para indo mentor dalam menjalankan implementasi kebijakan. Sikap mereka itu dapat dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan saran melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan kepentingan pribadinya. Sebuah implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dapat dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Antara lain pengetahuan pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan arah respon mereka apakah menerima atau menolak serta intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman terkait dengan maksud umum dari suatu sampel dan tujuan kebijakan adalah penting dikarenakan bagaimanapun juga diminta hidup Belanda berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana atau implementor tidak sepenuhnya menyadari bahwa standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang sangat penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakannya dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya ini akan dapat menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran ini merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa atas dampak implementasi suatu kebijakan. Mereka merupakan bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat menerima dapat menyesuaikan terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana proses atau daya tanggap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya dapat menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada pro kontra maka kebijakan tersebut akan berhasil. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran dalam mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diambil berdasarkan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka dengan partisipasi PKL dalam menjalankan program relokasi. Dengan demikian penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan terhadap kelompok sasaran akan sangat berperan penting.

3. Kebijakan yang diidealkan

Kebijakan yang diidealkan ini artinya pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sangat sulit dan kompleks. Proses dan transparan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi karena organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika sumber komunikasi itu berbeda dapat memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, ataupun sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada saat pelaksanaan kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit dalam melaksanakan suatu kebijakan itu secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Di samping itu, koordinasi merupakan sebuah mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Dalam konteks organisasi tunggal, atasan mencari mekanisme proses implementasi. Mereka memiliki standar kekuasaan personil, rekrutmen, seleksi, tugas dengan relokasi, kemajuan dan promosi serta yang adanya pemberhentian.

4. Faktor Environmental

Faktor environmental ini suatu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi sebuah implementasi. Pada *environmental factors* ini terdiri dari 2 unsur yang mempengaruhi implementasi program ini, yakni keadaan tempat tujuan dan lokasi dan besarnya pengaruh paguyuban. Keadaan tempat tujuan lokasi akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dalam hal ini. Besarnya kontribusi paguyuban juga mempengaruhi dalam hal ini. Oleh karena itu, yang perlu di perhatikan dalam menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan itu dilihat dari sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal yang tidak mendukung atau

tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah yang dari kegagalan proses implementasi kebijakan. Dikarenakan upaya implementasi kebijakan masyarakat dan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

I.5.4 Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam sebuah daerah memiliki penyelenggaraan otonomi tiap daerah. Terdapat 2 produk hukum tiap daerah salah satunya adalah Peraturan Daerah, kewenangan dalam pembuatan Perda ini merupakan wujud dari sebuah pelaksanaan sebuah hak otonomi yang sudah dimiliki oleh suatu otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan oleh DPRD, dalam menyelenggarakan suatu otonomi khusus tiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Perda merupakan penjabaran dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang akan berbeda tiap daerahnya²³. Perda tersebut dibuat oleh suatu daerah yang harus selaras dengan kepentingan umum dan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Perda dibuat mempunyai tujuan utamanya yaitu mewujudkan suatu kemandirian tiap daerah dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Terdapat proses pembuatan kebijakan atau perda masyarakat harus terlibat didalamnya dan memberikan hak suaranya. Keterlibatannya masyarakat terhadap pembuatan Perda tersebut dikarenakan hak masyarakat diatur didalamnya dan proses penetapan suatu Perda tersebut antara lain yaitu:

- a) Rancangan dalam Perda sudah disetujui oleh DPRD kepada Bupati dan ditetapkan sebagai perda dengan turut disampaikan oleh ketua DPRD kepada Bupati
- b) Penyampaian suatu rancangan perda yang dipimpin oleh ketua DPRD kepada Bupati yang akan dilakukan dengan jangka waktu maksimal selama seminggu penuh dari tanggal persetujuan dilakukan
- c) Rancangan suatu perda yang ditetapkan oleh Bupati harus paling lambat selama sebulan penuh sejak persetujuan dilakukan

²³ Abdullah, R. 2005. *“Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Hal : 131-132

I.5.5 Pola Penataan

Pola penataan dapat dilihat dari tiga aspek penting tersebut yaitu aspek ekonomi, sosial dan hukum. Terdapat beberapa konsep pola penataan PKL bertujuan sebagai paduan kepentingan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut²⁴.

- a) Relokasi ke suatu tempat bagi PKL yang memiliki spesifikasi produk tertentu.
- b) Pembentukan/pembuatan zoning (pembentukan kawasan PKL)
- c) Pembentukan zoning tersebut dengan membangun sebuah kios yang bekerja sama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan setiap keperluannya sangat membutuhkan pelayanan
- d) Pembuatan Shelter sebagai fasilitas umum atau sesuatu yang paling dibutuhkan untuk berlindung warga dan saat-saat tertentu supaya dapat digunakan untuk tempat usaha PKL.
- e) Penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) serta gerobak dorong guna menjadi tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian.
- f) Pembinaan dan penataan nonfisik dilakukan secara rutin oleh Pemkot atau Pemda dengan tujuan untuk merubah mental dan perilaku PKL.

Selain itu, konsep pola penataan juga didasarkan pada: sebuah paduan kepentingan PKL, dan Warga masyarakat perkotaan, serta Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, terdapat tingkat keterkaitan antara usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli, dan rencana pembelian

I.5.6 Pedagang Kaki lima

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang mempunyai usaha atau dagangan yang berlokasi di pinggi jalan ataupun trotoar. Pedagang kaki lima telah menjadi fenomena yang lazim yang tersebar di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewenangan khusus dalam

²⁴ Sutrisno, B., & Suwandi, J. 2007. "Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota". Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.8, No.2, Hal : 166-175

menyikapi fenomena tersebut. Terdapat karakteristik pedagang kaki lima yakni²⁵:

- a) Pedagang yang merangkap menjadi produsen
- b) PKL mempunyai 2 cara mencari lokasi untuk berdagang yaitu dengan cara menetap dan berpindah pindah
- c) Menjual barang dagangan dengan kondisi bisa bertahan lama
- d) PKL umumnya bermodalkan sedikit sebagai komisi atas jerih payahnya
- e) Barang dagangannya berkualitas rendah dan tidak berstandart
- f) Peredaran uang pada saat melakukan transaksi jual beli tidak seberapa besar
- g) Terdapat usaha keluarga yang dimana seluruh anggota keluarga ikut membantu
- h) Tawar-menawar dalam transaksi jula beli sudah menjadi kebiasaan
- i) PKL muncul karena musiaman dan menjadi salah satu pekerjaan tetap

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif melihat sebagian besar kehidupan sosial dengan intrinsik. Penelitian kualitatif adalah: *“Qualitative researchers use a language of case and contexts, employ bricolage, examine social processes and case in their social context, and look at interpretations or the creation of meaning in spesific settings. They look at social life from multiple points of view and explain how people construct identities. Only rarely do they use variable or test hypotheses, or convert social life into numbers.”*²⁶ Dari kebanyakan penelitian ada beberapa yang menggunakan *grounded theory* (teori dasar). Hal inilah didasarkan pada penelitian yang memiliki data yang fleksibel dan lebih menarik. penelitian kualitatif tetap terbuka terhadap perubahan sekalipun, penelitian kualitatif pun bersedia mengubah suatu arah atau fokus dari proyek penelitiannya dan mungkin meninggalkan akan pertanyaan asli dari penelitian mereka di tengah berlangsungnya proyek penelitian mereka.

²⁵ Kartono, K., Munthe, A. G., & Witono, B. M. 1980. *"Pedagang Kaki Lima Sebagai Realita Urbanisasi Dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah"*. (Universitas Katolik Parahyangan). 4(2), 115-119

²⁶ Neuman, W. L. 2006. *"Workbook for Neumann Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches"*. Inggris: Pearson/Allyn and Bacon. p. 295-329.

Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan segala sesuatu yang sedang berlangsung. Di dalamnya terdapat upaya yang terdiri dari mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan segala kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh suatu informasi mengenai suatu keadaan yang kaitannya dengan variabel-variabel saat ini.

Penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah proses penelitian yang pemahamannya berdasarkan suatu sistem metodologi tertentu yang tugasnya menyelidiki sebuah fenomena yang dimana terkait dengan sosial dan permasalahan pedagang informal²⁷. Pada penelitian ini dapat membuat suatu gambaran atau pola kompleks yang meneliti rincian laporan dari sudut pandangan responden dan melakukan penelitian dengan studi pada situasi alamiah dan bersifat pada penemuan yang ada. Penelitian kualitatif ini berfokus pada makna dan nilai yang terikat. Hakikat pada penelitian kualitatif lebih mengatami dan berinteraksi dengan responden yang berupaya memahami dan mengidentifikasi bahasa dan tafsiran yang responden berikan dan keterkaitan fokus penelitian untuk menggali dan memahami informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian.

Peran peneliti dalam hal ini adalah menjadi pengumpul data, menafsirkan data dan instrument kunci semua hal tersebut. Alat dalam pengumpulan data adalah dengan pengamatan secara langsung, wawancara serta studi dokumen yang terkait. Namun terkait kesahihan dan keterandalan data yang sering menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode tipe induktif, namun hasil pada penelitian kualitatif yang peneliti lebih menekankan pada makna yang terkandung daripada generalisasi. Peneliti dalam penelitian ini bertujuan dalam memahami dan memaknai suatu fenomena yang terjadi sebagai ciri-ciri dari penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif terhadap implementasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro dengan

²⁷ Sugiyono, 2012. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*". (Bandung: Alfabeta). 32(4)

menggunakan metode penelitian deskriptif²⁸. Dalam metode deskriptif ini mempunyai beberapa pertimbangan yaitu menyesuaikan metode deskriptif akan terasa mudah apabila terkait dengan kenyataan ganda, metode ini secara langsung menyajikan suatu hubungan antar peneliti dan responden dan metode deskriptif ini lebih menekankan pada kepekaan dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang harus dihadapi

1.6.2 Lokasi

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Oleh karena itu lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan tema penelitian dan sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. Sesuai dengan ketentuan tersebut, lokasi dari penelitian ini ditetapkan di area Jalan Kartini Kota Bojonegoro. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan asumsi peneliti terhadap realita yang mungkin tampak di lapangan dengan realita yang ada secara administratif dan mendesaknya program yang harus ditangani guna mendukung dan melestarikan predikat kota bersih dengan penghargaan Adipura. Melalui adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Jalan Kartini Kota Bojonegoro.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada sebuah subjek penelitian. Informan merupakan cara untuk dapat memperoleh informasi atau data terkait suatu kelompok atau entitas tertentu, informan tidak diharapkan sebagai representative terkait suatu kelompok dan entitas. Informan digunakan apabila terkait dengan subjek yang mewakili suatu kelompok dan terdapat hubungan antar peneliti dan subjek penelitian²⁹. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Neuman, Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan adalah

²⁸ Peraturan Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*.

²⁹ Afifuddin., & Saebani, B. A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia).

teknik *purposive*. *Purposive* yaitu teknik pengambilan sample non-random dalam penelitian lapangan dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data yang sangat informatif. Teknik *purposive* ini dimana peneliti memilih informan yang memang dianggap paling mengetahui serta memahami tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Staff Pelaksana BUP (Bina Usaha Perdagangan) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bapak Pantja karena beliau dianggap paling mengetahui tentang peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sebagai koordinator dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bapak Sunasrib karena beliau akan menjelaskan tentang penertiban dan pengawasan.
3. Ketua paguyuban pedagang kaki lima, yaitu Bapak Slamet karena beliau dianggap sebagai penyalur aspirasi para pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.
4. Pedagang kaki lima, yaitu Bapak Fatkhur Rochman dan Bapak Asep Komarudin karena beliau akan menjelaskan tentang manfaat yang dirasakan setelah adanya penataan pedagang kaki lima di Kotaa Bojonegoro,

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dibuat diperlukan suatu data atau informasi sebagai tanda untuk hasil akhir dari sebuah penelitian tersebut dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1.6.4.1 Observasi

Dalam hal ini observasi telah digunakan sebagai metode observasi yang dimana metode yang paling efektif guna melengkapi dan mengumpulkan data secara konkrit menggunakan format ataupun instrument penelitian. Metode observasi diartikan sebagai sebuah pengamatan secara sistematis dari fenomena

yang sedang terjadi. Observasi ini digunakan peneliti untuk mengamati kebijakan atau peraturan tentang penataan PKL, mengamati faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan dan kendala yang terkandung didalamnya, mengamati lokasi yang dijadikan tempat relokasi PKL, mengamati respon PKL terhadap penataan tersebut.

Observasi yang dilakukan peneliti tersebut adalah non partisipan, yang dimana peneliti berperan sebagai pengamat fenomena yang sedang terjadi. Pengamatan bisa dilakukan secara langsung yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fokus penelitian secara utuh atau lengkap. Hasil dari sebuah observasi atau pengamatan didapatkan catatan lapangan yaitu peristiwa, temporal dan interaksi didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke tempat dimana terjadinya penataan PKL dan tempat relokasi yang sudah disediakan.

1.6.4.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini sangat memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pengumpulan data. Metode ini terdiri dari interview yang memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan beberapa angket kepada para responden yang terkait, hal itu lebih mudah dari mendapatkan informasi atau data dengan cara tatap muka. Wawancara dalam hal ini adalah sebuah percakapan dengan tujuan dan maksud tertentu. Wawancara tersebut bisa dilakukan jika terdapat dua pihak yang terdiri dari pewawancara dan diwawancarai yang dilakukan oleh dua pihak tersebut dengan cara berdialog serta tanya jawab terhadap para PKL dan pemerintah daerah yang bersangkutan (Bupati dan DPRD)³⁰. Hasil dari wawancara tersebut adalah identitas responden, deskripsi informasi, identitas suatu masalah dan deskripsi dalam konteks situasi

1.6.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini tidak kalah penting dari kedua metode lain yaitu dokumentasi, mencari sumber data yang mengenai beberapa hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, agenda dll, di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini terlihat agak sulit dalam artian data yang belum berubah. Hasil

³⁰ Risnayanti. 2004. *"Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang"*. (Jakarta: Perpustakaan Umum).

dari metode dokumentasi ini bukan benda hidup namun benda mati yang dikumpulkan sebagai sumber data. Dokumentasi diartikan sebagai sumber tertulis yang informasi tentang sejarah sebagai suatu kesaksian yang berbentuk lisan, tulisan dll³¹. Hanya diperuntukan dalam bagian surat resmi dan surat kenegaraan yaitu perjanjian, Undang-Undang, hibah dll. Dalam hubungannya terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum³² terhadap penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro seperti dokumen penting yang terkait satu dengan yang lain yang dimana menjadi sumber utama penelitian.

1.6.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam mendapatkan dan menetapkan keabsahan data dalam penelitian tersebut diperlukan teknik dalam pemeriksaan data. Teknik tersebut mempunyai kriteria yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1.6.5.1 Kredibilitas

Kredibilitas merupakan menjaga suatu kepercayaan penelitian dan peneliti dengan cara

- a) Memperpanjang masa observasi merupakan peneliti dalam keikutsertaan didalam suatu proses penelitian dan memperpanjang sebuah keikutsertaan peneliti dalam kepercayaan terhadap data yang sudah terkumpul.
- b) Ketekunan dalam pengamatan yang dilakukan terus-menerus. Pada kegiatan atau tindakan ini dapat ditemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan terhadap fenomena atau isu yang terkait.
- c) Triangulasi data. Dalam pemeriksaannya dapat dibandingkan pada data dan sumber penelitian guna mengantisipasi data yang hilang serta melakukan kegiatan triangulasi terhadap data-data yang telah ditemukan peneliti dari sebuah wawancara.
- d) Pemeriksaan sejawat adalah memberikan suatu kesempatan dalam menganalisis suatu hipotesis yang muncul dari fenomena yang terkait.

³¹ Satori, D. A., & Komariah, A. 2009. "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta* 22. Hal 16-19. 17(50)

³² Peraturan Daerah, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*.

- e) Analisis terhadap kasus negative. Ini dilakukan melalui jalan dengan mengumpulkan contoh yang bertolak belakang dan menjadikannya pembandingan
- f) Kecukupan referensi, yang digunakan dengan sebuah sumberdaya dengan pengecekan ulang terhadap sumber data yang membandingkan sebuah hasil didalamnya.

1.6.5.2 Keteralihan

Melakukan sebuah uraian dari sebuah rincian dan struktur teori dan data agar mendapat gambaran yang sangat jelas dan terkait penerapannya dalam konteks lain. Dalam hal tersebut peneliti harus bisa menyajikan sebuah data dan teori didalam penelitian. Maka pembaca akan langsung memberikan masukan tentang penelitian ini.

1.6.5.3 Ketergantungan

Mengusahakan suatu proses terhadap penelitian agar konsisten melalui cara menindak ulang aktifitas yang ada terdapat penelitian terhadap data yang diperoleh terkait konsistensi dan realibilitas. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara beberapa kali dan mengadakan pengamatan dalam tingkat reabilitas lebih tinggi

1.6.5.4 Kepastian

Peneliti mengusahakan supaya data bisa menjamin sebuah kepercayaan dengan kualitas yang bisa diandalkan serta data yang diperoleh valid dengan cara menganalisis semua data dan teori dengan kepastian yang diperoleh peneliti. Peneliti harus bisa diakui banyak orang dan bersifat objektif dan peneliti seharusnya menguji kevalidan data dan keabsahan sebuah data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi

1.6.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis sebuah data penelitian adalah satu langkah yang kritis dengan menggunakan data statistik dan non statistik. Pengertian analisi data adalah suatu proses yang dimana mengatur urutan data dan informasi yang didapat yang dikategorikan kedalam suatu pola dan kategori serta dapat penemuan tema dan dapat dirumuskan sebagai hipotesis yang disarankan. Penelitian ini dilakukan

secara berkesinambungan dari awal hingga akhir, baik data lapangan ataupun diluar lapangan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman³³ yaitu:

- a) Reduksi data adalah suatu bentuk dari sebuah analisis data didalam penelitian yang dianggap penting dan digolongkan serta mengarahkan data agar tersusun secara sistematis dan dapat membuat kesimpulan. Data dari teknik pengumpulan data dikaji dan diseleksi dan kemudian disimpulkan peneliti dengan ada tidaknya nilai data dalam fenomena terkait.
- b) Penyajian data, tersusun atas kemungkinan yang ada beberapa indikator yaitu penarikan kesimpulan yang terjadi pada saat pengambilan suatu tindakan dan kebijakan proses tersebut mengungkapkan data secara keseluruhan dari data yang diperoleh agar dapat dipahami dan teks harus bersifat naratif. Data bisa menggambarkan terhadap proses implementasi kebijakan terhadap penataan PKL.
- c) Verifikasi data dan kesimpulan harus diatur agar dapat disimpulkan data yang ditemukan, namun kesimpulan hanya bersifat sementara. Untuk mendapatkan kesimpulan *grounded* maka perlu data yang terbaru dalam melakukan sebuah pengujian ilmiah dari implementasi kebijakan diatas dan menyimpulkannya menjadi hasil penelitian.

³³ Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 3(9), 10.